



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

EVALUASI TUGAS DAN FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA TANJUNG SIMANDOLAK KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

GUSTI PRASTIYO

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : gustiprasetio965@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila kinerja segenap aparatur desa dalam bekerja sesuai dengan tanggungjawab tugas pokok dan fungsi yang seharusnya, sehingga perlu untuk dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi tugas dan fungsi administrasi pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi tugas dan fungsi administrasi pemerintah Desa dari aspek kualitas kerja hanya satu program kerja yang tertata dengan baik, pembagian kerja dan jadwal piket sebagai cara yang digunakan untuk mempercepat dan mengatur waktu seluruh pekerjaan telah dibagi habis berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi. komitmen secara organisasi Aparatur Desa tidak diikuti oleh komitmen secara pribadi. Hasil sebaran kuesioner menunjukan evaluasi tugas dan fungsi administrasi pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata 3,74 berarti termasuk pada interval Baik, serta observasi lapangan yang menunjukkan evaluasi tugas dan fungsi administrasi pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan Baik.

Kata Kunci: Evaluasi Pemerintah Desa, Tugas dan Fungsi

ABSTRACT

The implementation of village government will be structured and increasingly directed, better and even more advanced if the performance of all village apparatus in working in accordance with the responsibilities of the main tasks and functions that should be, so it needs to be evaluated. This study aims to determine the evaluation of administrative duties and functions of the Tanjung Simandolak Village government, Benai District, Kuantan Singingi Regency using quantitative methods. The results showed that the evaluation of the tasks and functions of the village government administration from the aspect of work quality was only one well-organized work program, the division of labor and the picket schedule as a method used to speed up and manage the time of all work had been completely divided based on tasks, principals, and functions. . the organizational commitment of the Village Apparatus is not followed by a personal commitment. The results of the questionnaire distribution show the evaluation of administrative duties and functions of the Tanjung Simandolak Village government, Benai District, Kuantan Singingi Regency which produces an average value of 3.74 which means that it is included in the Good interval, as well as field observations which show the evaluation of the tasks and functions of the Tanjung Simandolak Village administration, Benai District, District. Kuantan Singingi has been going well.

Keywords: Village Government Evaluation, Duties and Functions



1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, profesional dan mampu berbuat local serta bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Dalam konteks otonomi daerah seperti sekarang ini sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkat pemerintahan rendah adalah desa atau kelurahan dalam hal ini pemerintah desa adalah subsistem terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya desa diperlukan pemerintah desa yang dapat bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah.

Hal ini berorientasi pada fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat sampai daerah. Salah satu instansi yang dibentuk oleh pemerintah di daerah yaitu desa. Kedudukan peranan desa berkembang pesat dan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Negara. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat.

Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan di segala bidang. Penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa sebagaimana adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksana teknis. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Sumber : Penelitian Viola Lumempow dan Johnny H. Posumah 2021)



Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturendelandschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewisuda semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Sumber : UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa di antaranya, (Sumber: pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa, Erlangga, Jakarta, 2011.)

1. Tugas Kepala Desa yaitu; Menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kemasyarakatan. Fungsi Kepala Desa adalah Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Tugas Sekretaris Desa Yaitu; Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah



desa. Fungsi Sekretaris Desa adalah Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa, Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan, Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara, Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa, Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Tugas Kaur Umum yaitu; Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan dalam administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsi Kaur Umum adalah Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan, Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa, Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, Pengelolaan administrasi perangkat Desa, Persiapan bahan-bahan laporan, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
4. Tugas Kaur Keuangan yaitu; Membantu Sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. Fungsi Kaur Keuangan adalah Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa, Persiapan bahan penyusunan APB Desa, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
5. Tugas Kaur Pemerintahan yaitu; Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, kebijakan penataan dan kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Fungsi Kaur Pemerintahan adalah Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan, Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa, Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan, Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa, Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil, dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.
6. Tugas Kepala Dusun (KADUS) yaitu; Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT dan RW di wilayah kerjanya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Fungsi Kepala Dusun adalah Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun, Melakukan tugas dibidang pembangunan dan



pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian, Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat, dan Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

Beberapa kinerja Aparat Desa yang sering dikeluhkan oleh masyarakat diantaranya, kurangnya kualitas pelayanan, pembangunan infrastruktur yang lambat dan kurang diperhatikan oleh pemerintah, pembagian tugas yang kadang tidak sesuai dengan tupoksinya. Hal yang sering dialami oleh masyarakat juga biasanya program pemerintah yang kurang adil dan tidak berdampak bagi masyarakat sepenuhnya. Selain permasalahan diatas, dapat dilihat juga dari kurangnya kreativitas dari pemerintah desa untuk menciptakan suatu yang baru guna kemajuan desa.

Secara umum, dapat diasumsikan sementara bahwa kinerja Aparat Desa Tanjung Simandolak belum maksimal, namun asumsi ini masih bersifat sementara dan perlu dikaji lebih mendalam melalui suatu penelitian ilmiah menggunakan prinsip-prinsip akademik dalam pelaksanaannya.

Dari uraian masalah di atas mengenai kinerja Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penulis mengangkat ini ke dalam judul **“Evaluasi Tugas Dan Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalah terciptanya dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarasi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Administrasi Negara adalah suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalam bahasan ilmu sosial yang ada pada administrasi negara, terdapat tiga elemen penting yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Adminisrtasi Negara secara umum di artikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh semua aparatur Negara untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan Negara yang telah di tentukan sebelumnya.

Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cara mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-menetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Menurut Chandler dan Plano dalam keban (2014:3) Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoorganisasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola



(memanage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*artand science*) yang ditunjukkan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan dan sebagai suatu disiplin ilmu, Administrasi Publik melalui perbaikan atau menyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Irra Chisyanti Dewi (2011:3) dalam buku pengantar administrasi mengatakan bahwa “administrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan”, yaitu meliputi kegiatan penerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan.

Menurut McCurdy dalam keban (2014:3) Mengatakan bahwa Administrasi Publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu cara metode memerintah suatu Negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsip untuk melakukan berbagai fungsi Negara. Dengan kata lain Administrasi Publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik. Anggapan ini mungkin membingungkan pendefinisian administrasi publik, termasuk ruang lingkupnya. Akan tetapi hal ini justru menunjukkan bahwa dunia administrasi publik itu terus mengalami perkembangan dan justru sulit untuk dipisahkan dari dunia politik.

2.1.2 Teori Kinerja

Menurut Bangun (2012:231) kinerja (*performance*) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (*job requirement*) Robbins (2008) juga mendefinisikan bahwa kinerja dapat menjadi hasil dari seorang individu atau dapat berupa hasil dari kerja kelompok dalam satu organisasi.

Menurut Moeheriono (2012:95) kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Menurut Robbins (2016:260) indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapain kinerja karyawan. Berikut beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah Kualitas Kerja, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektifitas dan Kemandirian.

Menurut Gomez (dalam Kaswan, 2012:189) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada tiga, yaitu:

1. Faktor kemampuan mencerminkan talenta dan keterampilan karyawan, yang meliputi intelegensi, keterampilan interpersonal dan pengetahuan pekerjaan.
2. Faktor motivasi dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal (seperti penghargaan dan hukuman) tetapi pada akhirnya merupakan keputusan internal dimana tergantung karyawannya seberapa besar mencurahkan energinya untuk menyelesaikan tugasnya.



3. Faktor situasi/sistem meliputi sejumlah karakteristik organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja baik positif maupun negatif.

Menurut Bastian (dalam Sofyan, 2014:1) Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per-individu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Menurut Mangku negara (dalam Sofyan, 2014:1) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Sastiohadwiryo (2014:26) Kinerja adalah terjemahan dari *performance* yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Menurut Prawirosentono (2014:87) Kinerja Merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Menurut Irfan Fahmi (2015:2) Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi itu bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Menurut Amstron dan Baron (dalam Irfan Fahmi, 2015:2) Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Menurut Bastian (dalam Irfan Fahmi, 2015:2) Kinerja gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Menurut Wibowo (2015:7) Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

Menurut Mangkunegara (2015:67) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Armstrong dan Baron dalam buku Wibowo (2016:2) Kinerja merupakan hasil perkerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis oragnisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Menurut Wibowo (2016:2) berpendapat bahwa kinerja adalah nilai serangkaian perilaku pekerjaan yang memberikan kontribusi, baik secara positif maupun negatif, pada penyelesaian cara mengerjakan.

2.1.3 Teori/Konsep Manaejmen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja



lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut para ahli manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut, Menurut Handoko (2014,p.4) Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Menurut Edy Sutrisno (2012:6) lebih spesifik mengatakan bahwa, “MSDM merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.” Dari beberapa definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan suatu kegiatan atau system manajemen yang mengadakan dan mengelolah sumber daya manusia yang siap, bersedia, dan mampu memberikan kontribusi yang baik agar dapat bekerjasama secara efektif untuk mencapai tujuan yang baik secara individu ataupun organisasi.

Menurut (Nawawi, 2011) Manajemen sumber daya manusia mengandung pengertian yang erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia atau pegawai dalam perusahaan, Sumber daya manusia dapat juga disebut sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Menurut Hasibuan (2019) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

2.1.4 Teori/Konsep Organisasi

Teori Organisasi adalah teori yang berusaha memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana, mengapa, dan sampai sejauh mana berbagai desain, struktur, dan proses pengambilan keputusan organisasi efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara umum, pengertian organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa berupa institusi, asosiasi atau lembaga, yang memiliki tujuan sama dan berhubungan dengan lingkungan luar.

Menurut Waber dalam buku Silalahi (2011:124) Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerjasama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.

Menurut Mathis Alam dalam buku Erni Rernawan (2011:15) Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan.

2.1.5 Teori Evaluasi



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Evaluasi adalah suatu penelitian dimana penelitian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjai umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2010). Dalam hal ini yusuf menitikberatkan kajian evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsure manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya yaitu perencanaan.

Evaluasi menurut Arikunto (2010:2) adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

2.1.6 Kosep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 2014). Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desamerupakan perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pendesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan kepemimpinan kepala desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang;

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan APB Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa

2.1.7 Teori Tentang Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak



tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tak dapat terpisahkan. Pentingnya desa ini disampaikan oleh berbagai ahli yang memberikan pendapatnya. Oleh karena itulah, keberadaan desa semestinya tidak boleh diremehkan termasuk juga oleh pemerintah karena pentingnya keberadaan desa tersebut. Berikut beberapa definisi desa menurut berbagai ahli.

Sebelum memulai untuk membaca mengenai definisi desa menurut para ahli, kita sebaiknya melihat terlebih dahulu definisinya. Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari desa sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa desa memiliki berbagai peranan penting.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Sanityanti Nurmuharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Menurut R. Bintarto, Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Rifhi Siddiq, Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012:8).

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2015:7).



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang memutuskan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan rata-rata 3,74 berarti termasuk dalam pada interval Baik karena berada pada peringkat 2 yaitu 3,70–4,59. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Baik, terlihat dengan kemampuan teknis, kemampuan konsptual dan kemampuan hubungan interpesonal sesuai dengan indikator dan berjalan dengan Baik.

Dapat dilihat bahwa terhadap indikator Kemampuan Teknis Dalam menjalankan Tugas Dan Fungsi di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah Baik, kemudian indikator kemampuan Konseptual Dalam menjalankan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah Baik, dan indikator Hubungan Interpersonal Dalam menjalankan Tugas Dan Fungsi di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah Cukup Baik, dan setelah di lihat dari ketiga indikator tersebut untuk Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan Baik.

Serta observasi dilapangan yang menunjukkan tanggapan responden mengenai Indikator Kemampuan Teknis, Indikator Kemampuan Konseptual dan Indikator Kemampuan Hubungan Interpersonal Dalam Menjalankan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tersebut sudah Cukup Baik karena jumlah rata-rata yang diperoleh adalah 3,74.

Menurut Analisis yang saya dapat pada rakapitulasi dari ke tiga indiktor tersebut bahwa terhadap indikator Kemampuan Teknis Dalam menjalankan Tugas Dan Fungsi di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah Baik, karna mempunyai rata-rata 3,82 atau termasuk interval Baik, kemudian pada indikator kemampuan Konseptual Dalam menjalankan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah Baik, karna memiliki rata-rata yaitu 3,74 atau tergolong interval Baik, dan untuk indikator Hubungan Interpersonal Dalam menjalankan Tugas Dan Fungsi di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah Cukup Baik, karena memiliki rata-rata yaitu 3,66 atau tergolong pada inval cukup baik dan setelah di lihat dari ketiga indikator tersebut untuk Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan Baik.



5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner yang memutuskan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan rata-rata 3,74 berarti termasuk dalam pada interval Baik karena berada pada peringkat 2 yaitu 3,70–4,59. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan Evaluasi Tugas Dan Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Baik, terlihat dengan kemampuan teknis, kemampuan konsptual dan kemampuan hubungan interpersonal sesuai dengan indikator dan berjalan dengan Baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tiada henti untuk Penulis Ayahanda Rewan Sahedi dan Ibunda Sesmaneti yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Bapak Dr.H.Nopriadi, S.K.M Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Sahri Muharam, S.Sos., M.Si, Selaku dosen pembimbing I, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahyar, Hardani, and Dkk. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Armstrong dan Baron, 2016. Landasan teori dan pengertian kinerja, Palembang : Wibowo.
- Banga, Wempy. 2018 Kajian Administrasi Kontemporer, Yogyakarta :Gava Media.
- Basuki, Johanes. 2018, Administrasi Publik, Depok : PT Raja Grafindo.
- Purwanto, Agus, Erwan, 2015, Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gava Media.
- Sarwono, Jonathan. 2013 Srategi Melakukan Riset : Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan. Yogyakarta : Andi Publisher.
- Sugiono, 2015 Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : Afabeta.
- Subarsono, 2013. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sofyan, 2014. Manajemen Kinerja. Stain Jember Press : Imam Ashari.
- Tahier Rohana dn Makmur, 2017,Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara, Depok : Raja Grafindo.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

B. Dalam Undang-Undang

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam landasan hukum.